

# Peran HAM dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera

Ahmad Dimas arviansyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: [ahmaddimasarviansyah@gmail.com](mailto:ahmaddimasarviansyah@gmail.com)

## Kata Kunci:

Hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, masyarakat, penegakan HAM.

## Keywords:

Human rights, justice, welfare, society, human rights enforcement.

## ABSTRAK

Penelitian ini menguraikan peran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penegakan nilai-nilai HAM untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. HAM dalam konteks ini adalah hak-hak fundamental yang inheren bagi setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati, dijaga, dan ditegakkan dalam interaksi sosial dan kenegaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji signifikansi HAM dalam memfasilitasi keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan warga, serta memastikan kehidupan yang harmonis dan demokratis. Teknik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mencakup berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, peraturan, dan jurnal yang

berkaitan dengan asas HAM. Temuan yang didapatkan menunjukkan bahwa HAM berkontribusi besar dalam menciptakan kesetaraan hak, jaminan hukum, kebebasan berekspresi, serta kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa adanya diskriminasi. Penegakan HAM juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang layak. Penghargaan terhadap HAM berpotensi memperkuat demokrasi, menciptakan stabilitas dalam aspek sosial dan politik, serta meningkatkan saling menghormati antar individu dalam masyarakat. Peningkatan penghormatan dan penegakan HAM harus terus diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, aman, damai, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

## ABSTRACT

This research examines how human rights contribute to the establishment of a fair and thriving society. Human rights are essential entitlements inherent to every individual from birth that should be acknowledged, safeguarded, and promoted within both social and governmental contexts. The goal of this research is to explore the significance of human rights in fostering social equity, enhancing public well-being, and sustaining a balanced and democratic community. A qualitative descriptive approach is utilized for this study, incorporating literature reviews from diverse resources such as books, journals, legal documents, and scholarly articles pertinent to human rights. Findings from the research reveal that human rights are crucial in fostering equal rights, ensuring legal safeguards, promoting freedom of speech, and providing equal chances for all individuals without bias. The promotion of human rights also has a positive impact on the advancement of public welfare through the realization of economic, social, cultural, educational, health, and environmental rights. Upholding human rights can bolster democratic principles, establish social and political stability, and enhance mutual respect among community members. Consequently, the recognition and implementation of human rights need to be continually enhanced to foster a just, secure, peaceful, and prosperous society in line with the aspirations of the Indonesian people.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang diberikan kepada setiap individu sejak kelahiran sebagai hadiah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. HAM meliputi hak untuk hidup, mendapatkan kebebasan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman, serta perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks berbangsa, HAM menjadi salah satu tolok ukur yang krusial untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Negara yang menjunjung tinggi HAM akan mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya (Syahputra et al., 2023).

Permasalahan HAM yang terjadi di berbagai bidang kehidupan. Pelanggaran HAM dapat berupa ketidakadilan hukum, diskriminasi sosial, kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, kekerasan, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Ketimpangan ekonomi dan sosial juga menjadi faktor yang menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Meskipun perlindungan HAM telah diatur dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sejumlah regulasi lainnya, implementasi hak asasi manusia masih menemui berbagai rintangan. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan tanggung jawab, penegakan hukum yang tidak memadai, serta kurangnya perhatian terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan berkontribusi pada masih adanya pelanggaran hak asasi manusia (Nazril et al., 2024).

Permasalahan tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran HAM dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. HAM tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak individu, tetapi juga sebagai dasar dalam menciptakan kehidupan yang menghargai persamaan, kebebasan, dan keadilan sosial. Dengan adanya penghormatan terhadap HAM, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperoleh kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi (Dwi et al., 2024).

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran HAM dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, menjelaskan berbagai bentuk permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat, serta menganalisis pentingnya penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari (Besar, 2011).

Pentingnya pembahasan mengenai HAM tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera. HAM menjadi landasan utama dalam menciptakan keadilan sosial karena setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Dengan ditegakkannya HAM, maka tercipta hubungan sosial yang lebih harmonis serta meningkatkan rasa saling menghormati antarindividu maupun kelompok. Pemahaman dan penerapan HAM sangat penting untuk mendukung terciptanya masyarakat yang berkeadilan, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Zaetama, 2024).

## Pembahasan

### Pengertian dan Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia, yang sering disingkat menjadi HAM, merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak kelahiran mereka sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Hak-hak ini melekat pada diri setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia itu sendiri. HAM memiliki sifat yang alamiah, yang menunjukkan bahwa keberadaannya tidak tergantung pada pengakuan dari negara atau entitas tertentu. Setiap orang, terlepas dari latar belakang etnis, keyakinan agama, ras, gender, bahasa, budaya, atau posisi sosial, berhak atas penghormatan dan perlindungan terhadap martabatnya. HAM memiliki sifat yang universal karena berlaku untuk seluruh umat manusia di mana pun mereka berada (Renata, 2021).

Konsep HAM lahir dari kesadaran bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, perjuangan untuk memperoleh kebebasan dan keadilan menjadi salah satu faktor utama lahirnya konsep HAM. Banyak peristiwa sejarah menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak manusia dapat menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, penindasan, bahkan konflik sosial yang berkepanjangan. Penghormatan terhadap HAM menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera.

HAM mencakup beragam jenis hak yang sangat crucial bagi kehidupan manusia. Hak-hak ini terdiri dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Hak sipil mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak atas kebebasan pribadi, serta hak untuk terhindar dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Hak politik mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan. Hak ekonomi dan sosial mencakup hak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, hak untuk menerima pendidikan, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan hak untuk hidup dengan sejahtera. Hak budaya berhubungan dengan hak untuk melestarikan identitas budaya, bahasa, serta tradisi masing-masing. Perlindungan terhadap HAM telah menjadi elemen penting dalam sistem pemerintahan (Darajati & Syafei, 2020).

Ini dapat diamati dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945, terutama di Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mengatur berbagai hak-hak warga negara. Pemerintah pun telah memberlakukan UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia sebagai wujud komitmen negara dalam menjamin dan menegakkan HAM. Indonesia juga berpartisipasi dalam sejumlah perjanjian internasional terkait HAM sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak-hak manusia di skala global.

HAM memiliki sejumlah karakteristik utama yang membuatnya berbeda dari hak lainnya. Pertama, HAM bersifat global, yang berarti berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kedua, HAM tidak dapat dihapuskan, karena hak ini sudah ada pada manusia sejak kelahiran. Ketiga, HAM tidak dapat dipisahkan, yang menunjukkan bahwa setiap hak memiliki tingkat kepentingan yang sama dan saling terhubung. Keempat,

HAM adalah hak yang fundamental karena menjadi kondisi esensial bagi manusia untuk hidup dengan layak dan bermartabat.

HAM memiliki beberapa kaidah utama yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial dan pemerintahan. Kaidah yang pertama adalah kaidah kesetaraan. Kaidah ini menegaskan bahwa seluruh umat manusia memiliki posisi yang setara di depan hukum dan pemerintah. Tidak diperbolehkan ada perlakuan yang membedakan seseorang hanya berdasarkan agama, ras, suku, jenis kelamin, atau status finansial. Setiap orang berhak dan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik lainnya.

Prinsip kedua adalah prinsip kebebasan. Kebebasan merupakan hak setiap individu untuk berpikir, berbicara, menyampaikan pendapat, memeluk agama, serta menentukan pilihan hidupnya. Kebebasan menjadi unsur penting karena memungkinkan masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Kebebasan juga memiliki batasan, yaitu tidak boleh merugikan hak dan kebebasan orang lain. Pemanfaatan kebebasan harus disertai dengan tanggung jawab agar dapat terwujud kehidupan yang teratur dan harmonis (Junaedi & Rohmah, 2020).

Prinsip ketiga ialah prinsip keadilan. Keadilan merujuk kepada pemberian hak kepada setiap individu selaras dengan bahagian mereka tanpa sebarang bentuk diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang. Keadilan mencakup perlakuan yang sama di hadapan hukum, pemerataan kesempatan, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang lemah atau rentan. Penegakan keadilan sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Prinsip keempat adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap manusia harus diperlakukan secara manusiawi karena memiliki harkat dan martabat yang sama. Tidak seorang pun boleh diperlakukan secara kejam, dihina, disiksa, atau direndahkan. Penghormatan terhadap martabat manusia menjadi inti dari HAM karena tujuan utama HAM adalah melindungi nilai kemanusiaan itu sendiri.

HAM sangat terkait dengan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dalam konteks sosial, setiap orang tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menghargai hak orang lain. Kebebasan individu seharusnya tidak dimanfaatkan untuk merugikan orang lain. Pemahaman akan signifikansi penghormatan terhadap hak dan kewajiban perlu ditanamkan dalam aktivitas sehari-hari untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. HAM sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena HAM menjadi dasar dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan berkeadilan (Sofian, 2023).

Tantangan terhadap penegakan HAM semakin kompleks. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial sering kali menimbulkan berbagai persoalan baru yang berkaitan dengan HAM, seperti penyebaran ujaran kebencian, pelanggaran privasi digital, perdagangan manusia, hingga ketidakadilan sosial akibat kesenjangan ekonomi. Perlindungan dan penegakan HAM harus senantiasa diperkuat agar bisa menghadapi tantangan era. Pendidikan mengenai HAM merupakan salah satu langkah kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya menghormati hak-hak manusia. Masyarakat dapat mengenali hak dan tanggung jawab mereka serta

belajar untuk menghargai perbedaan dan keragaman. Pemahaman ini akan berkontribusi pada terciptanya kehidupan sosial yang lebih damai dan toleran (Yuda et al., 2026).

### **Peran HAM dalam Mewujudkan Masyarakat yang Adil**

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil. Keadilan merupakan kondisi di mana setiap individu memperoleh hak dan kewajibannya secara seimbang tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan menjadi salah satu unsur utama yang menentukan terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, dan damai. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk berkembang, memperoleh perlindungan hukum, serta menikmati hasil pembangunan tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun juga status sosial (Annisa, 2025).

HAM menjadi dasar utama dalam mewujudkan keadilan karena HAM menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama. Semua manusia memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara manusiawi. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi HAM, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, serta perlindungan hukum. Tidak boleh ada pihak tertentu yang memperoleh perlakuan istimewa sementara pihak lain mengalami diskriminasi atau ketidakadilan.

Salah satu bentuk nyata peran HAM dalam mewujudkan masyarakat yang adil adalah melalui penegakan hukum yang tidak memandang status sosial, jabatan, kekayaan, ataupun latar belakang seseorang. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam HAM. Semua warga negara harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa adanya pilih kasih. Penegakan hukum yang adil akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga hukum (Adityo, 2013).

HAM memiliki peran penting dalam melindungi kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Kelompok rentan adalah kelompok yang sering mengalami perlakuan tidak adil atau kesulitan memperoleh hak-haknya secara maksimal. Kelompok tersebut antara lain anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat, dan lansia. Dalam banyak kasus, kelompok rentan sering menjadi korban diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial. Anak-anak, misalnya, memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Masih banyak anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, bahkan putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga. Begitu pula perempuan yang terkadang masih mengalami diskriminasi dalam dunia kerja maupun kehidupan sosial. Penyandang disabilitas juga sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas umum. HAM berfungsi untuk menjamin bahwa setiap kelompok masyarakat memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

Peran HAM dalam mewujudkan masyarakat yang adil juga terlihat dalam kehidupan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, warga negara berhak untuk mengungkapkan pandangan, memberikan masukan, serta ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik. Kebebasan untuk berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat vital, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, mengawasi jalannya pemerintahan, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa (Gulo & Mendrofa, 2025).

Partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan masyarakat melalui kritik, saran, dan masukan yang diberikan oleh warga negara. Apabila kebebasan berpendapat dibatasi atau ditekan, maka masyarakat akan kesulitan menyampaikan aspirasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan sosial. Penghormatan terhadap HAM sangat penting dalam menjaga kehidupan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Peran HAM dalam menciptakan keadilan juga terlihat dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara tanpa diskriminasi. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan yang merata dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Melalui pendidikan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan daerah terpencil, memperoleh akses pendidikan yang layak.

HAM memiliki peranan dalam membangun keadilan di bidang ekonomi. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang baik serta hidup yang bermartabat. Dalam komunitas yang adil, kemajuan ekonomi seharusnya dirasakan oleh semua golongan, bukan hanya sekelompok orang tertentu. Pemerintah harus merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat menekan kesenjangan sosial dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat secara merata. Keadilan di sektor ekonomi sangat krusial sebab ketimpangan ekonomi yang besar bisa memicu berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, tingkat pengangguran yang tinggi, tindak kriminal, serta konflik dalam masyarakat. Warga masyarakat seharusnya mendapatkan kesempatan yang setara untuk bekerja, berusaha, dan memperoleh pemasukan yang wajar. Ini akan berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial dan peningkatan taraf hidup Masyarakat (Arifin et al., 2024).

HAM dapat memperkuat rasa persatuan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika setiap individu merasa dihargai dan diperlakukan secara adil, maka akan tumbuh rasa saling menghormati dan toleransi antaranggota masyarakat. Sikap tersebut sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial, terutama di negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Penerapan nilai-nilai HAM dapat dilakukan melalui sikap saling menghargai, tidak melakukan diskriminasi, membantu sesama, dan menghormati pendapat orang lain (Zarwaki et al., 2022).

## Peran HAM dalam Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Hak Asasi Manusia (HAM) memainkan fungsi yang krusial dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan adalah keadaan di mana kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat materiil maupun spiritual, dapat terpenuhi, memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan layak, terjamin, damai, dan bahagia. Sebuah masyarakat yang sejahtera tidak hanya ditunjukkan oleh tercapainya kebutuhan ekonomi, tetapi juga ditandai dengan adanya rasa aman, peluang untuk berkembang, dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental manusia.

HAM merupakan salah satu fondasi penting dalam mencapai kesejahteraan, karena HAM memastikan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak dan mendapatkan peluang yang setara di berbagai bidang kehidupan. Di dalam komunitas yang menghargai HAM, setiap orang berhak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, menerima layanan kesehatan, menikmati suasana lingkungan yang baik, serta mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan sosial dapat tercapai (Makhmuri, 2022).

Salah satu bentuk nyata peran HAM dalam mewujudkan kesejahteraan adalah melalui pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi berkaitan dengan hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan yang adil, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pekerjaan yang layak sangat penting karena pekerjaan menjadi sumber utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya pekerjaan dan pendapatan yang memadai, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan dengan lebih baik.

Hak Asasi Manusia meliputi hak-hak sosial, seperti hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta perlindungan untuk kehidupan yang layak. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh anggota masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan publik tanpa adanya diskriminasi. Layanan publik yang berkualitas baik akan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat kesejahteraan sosial. Hak budaya juga menjadi bagian penting dalam HAM karena setiap individu memiliki hak untuk mempertahankan identitas budaya, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai tradisi yang dimilikinya. Penghormatan terhadap hak budaya dapat menciptakan rasa nyaman dan penghargaan terhadap keberagaman dalam kehidupan Masyarakat (Hasni, 2024).

HAM memiliki peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dapat menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Masyarakat miskin sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan hidup lainnya. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan sosial. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perhatian kepada masyarakat miskin. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pelayanan Kesehatan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang profesional, serta pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Program-program kesehatan, seperti imunisasi, pelayanan ibu dan anak, jaminan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan masyarakat, merupakan bentuk nyata pelaksanaan HAM dalam bidang kesehatan. Kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan kesejahteraan dapat tercapai secara lebih merata. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat. HAM memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa diskriminasi.

Pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir masyarakat agar lebih maju, kreatif, dan mandiri. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah memahami pentingnya menjaga kesehatan, menghormati hak orang lain, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Pemerataan pendidikan menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. HAM berperan dalam menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap manusia memiliki hak untuk menikmati lingkungan yang bersih, aman, dan bebas dari pencemaran. Lingkungan yang sehat sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia karena berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Kerusakan lingkungan, pencemaran udara, dan pencemaran air dapat mengancam kesejahteraan masyarakat serta menimbulkan berbagai penyakit dan bencana alam.

Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan, sementara masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Dengan terciptanya lingkungan yang sehat, masyarakat dapat hidup lebih aman dan nyaman. Penghormatan terhadap HAM dapat menciptakan stabilitas sosial dan politik yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Masyarakat yang merasa hak-haknya dihormati dan dilindungi akan memiliki rasa percaya terhadap pemerintah dan lebih aktif dalam mendukung pembangunan. Stabilitas sosial dan politik akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Pradanimas et al., 2024).

Pelanggaran HAM dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat. Konflik dan ketidakstabilan tersebut dapat menghambat pembangunan ekonomi serta memperburuk kondisi kesejahteraan masyarakat. Penghormatan terhadap HAM menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai dan sejahtera. Upaya mewujudkan kesejahteraan melalui HAM dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menghormati hak orang lain, membantu sesama, tidak melakukan diskriminasi, serta mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi HAM akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan penuh rasa solidaritas (Iqbal et al., 2024).

HAM memiliki peranan yang sangat besar dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penegakan HAM tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, aman, demokratis, dan

berkeadilan. Melalui penghormatan terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak dan berkualitas. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM harus terus ditingkatkan agar cita-cita bangsa untuk menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera dapat terwujud secara nyata (Annisa, 2025)

## Kesimpulan dan Saran

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. HAM memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil karena HAM menjamin persamaan hak, kebebasan, perlindungan hukum, serta kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi. Melalui penegakan HAM, masyarakat dapat hidup dengan aman, memperoleh keadilan, dan terhindar dari berbagai bentuk penindasan maupun penyalahgunaan kekuasaan. Penghormatan terhadap HAM juga mampu memperkuat kehidupan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan hubungan sosial yang harmonis.

HAM menjadi dasar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan ditegakkannya HAM, setiap individu memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak, pekerjaan yang baik, pendidikan yang berkualitas, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Penghormatan dan perlindungan terhadap HAM harus terus ditingkatkan oleh pemerintah maupun masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai, makmur, adil, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adityo, R. D. (2013). Mencari Konsep Wajah Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang Polemik Dan Tantangan Penegakan Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 146–164. <https://repository.uin-malang.ac.id/11302/>
- Annisa, W. R. (2025). Fungsi Hukum Sebagai Instrumen Yang Menjamin Perlindungan Dan Pemenuhan Ham Di Indonesia. *Global Review of Law and Human Rights*, 1(1), 36–48.
- Arifin, M. Z., Nugraha, M., Putri, T. Y., & Ramadhan, M. S. (2024). Membumikan Teori Negara Kesejahteraan Dalam Penguatan Dana Desa Untuk Pengentasan Kemiskinan Menurut Keadilan Distributif. *Journal Of Law And Social Society*, 1(2), 29–42.
- Besar, B. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora Binus*, 2(1), 201–213.
- Darajati, M. R., & Syafei, M. (2020). Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(2), 106–122. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.16999>

- Dwi, A. P., Ellocya, S., & Santia, S. (2024). Menegakkan Ham dan Mempertahankan Nilai Pancasila Dalam Masyarakat. *AKTIVISME: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(3), 79–89.
- Gulo, L. P. I., & Mendrofa, E. A. Y. (2025). Hak Untuk Bersuara, Kewajiban Untuk Berpartisipasi: Makna Demokrasi Sesungguhnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(2), 120–126.
- Hasni, M. (2024). Peran budaya dalam meningkatkan toleransi dan kerukunan beragama di masyarakat. *EDUCAZIONE: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 25–35.
- Iqbal, A. L., Akmal, A. R., Hilmy, M. E. H., & Deni, F. (2024). Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua. *JURNAL KAJIAN ISLAM MODERN*, 11(01), 58–65.
- Junaedi, A. M., & Rohmah, S. N. (2020). Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>
- Makhmuri, M. (2022). Perlindungan Hukum Atas Pemenuhan Hak Pekerja Dalam Ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Islam Menurut Abdullahi Ahmed An-Na'im [Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <https://repository.uin-malang.ac.id/15358>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, N., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 01–15.
- Pradanimas, A., Lifia, L., & Yuliana, I. (2024). Kesejahteraan Masyarakat Diukur Melalui Pengangguran, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3378–3391. <https://repository.uin-malang.ac.id/19645/>
- Renata, J. (2021). Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Awig Awig*, 1(2), 13–29.
- Sofian, M. (2023). Penegakan Hukum Ham Ditinjau dari Perspektif Hukum Maqashid Syariah. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(1), 29–46. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i1.16>
- Syahputra, A., Namira, A. N., Siregar, D. C., Haraha, S., Purba, W. A., & Yusnaldi, E. (2023). Hak asasi manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 32207–32213.
- Yuda, M., Amelia, Z., & Nada Azzahra, S. (2026). Hak Asasi Manusia Di Era Digital Tantangan Dan Peluang. *Journal of Social and Education*, 2(2), 308–316. <https://doi.org/10.66909/lrp.salut.v2i2.264>
- Zaetama, M. K. (2024). Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN : 3031-8882, 2(1), 450–457. <https://doi.org/10.62379/k6skmp76>
- Zarwaki, Z., Aunur, R., & Suwandi, S. (2022). Implementasi tanggung jawab negara dan aparatur keamanan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Desa Wadas perspektif teori kedaulatan rakyat. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 6909–6919. <https://repository.uin-malang.ac.id/12795/>